RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhmadulillahirrabbila'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Mungkid, September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang

KUNTA HENDRADATA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196810101988031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
SURAT PERNYATAAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 8
1.3. Maksud dan Tujuan 10
1.4. Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13
2.1. Gambaran Pelayanan DPRKP Kabupaten Magelang 13
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Kabupaten Magelang 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 40
3.1. Tujuan dan Sasaran 44
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPRKP Kabupaten Magelang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 48
3.3. Rumusan tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kab. Magelang 48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52
BAB V PENUTUP 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keselarasan dokumen RPJMD Kab. Magelang 2025-2029 dengan dokumen RPJMD Kab. Magelang 2025-2046.....	3
Tabel 1.2.	Keselarasan dokumen RPJMD Kab. Magelang 2025-2029 Dengan RPJMD Prop. Jateng 2025-2031.....	3
Tabel 1.3.	Keselarasan dokumen RPJMD Kab. Magelang 2025-2029 Dengan RPJM Nasional 2025-2031.....	5
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Eselon	20
Tabel 2.2.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang kepangkatan	20
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana DPRKP Kabupaten Magelang.....	22
Tabel 2.4.	Capaian Kinerja Pelayanan DPRKP Kabupaten Magelang 2020 - 2024	25
Tabel 2.5.	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 2.6.	Evaluasi capaian kinerja program DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 2.7.	Rekap Bantuan Sosial RTLH CSR Tahun 2020-2025.....	27
Tabel 2.8.	Pemetaan permasalahan pelayanan DPRKP Kab. Magelang	34
Tabel 2.9.	Teknik menyimpulkan isu strategis PD.....	38
Tabel 3.1.	Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.....	43
Tabel 3.2.	Rumusan tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.....	47
Tabel 3.3.	Penahapan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.....	48
Tabel 3.4.	Rumusan arah kebijakan Renstra DPRKP Kab. Magelang....	49
Tabel 4.1.	Rumusan program / Kegiatan / Sub Kegiatan.....	56
Tabel 4.2	Rencana program / kegiatan / sub kegiatan pendanaan Pemerintah Daerah.....	66
Tabel 4.3.	Program Prioritas Pendukung Sapta Cipta.....	95
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama PD.....	99
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama PD.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan RENSTRA DPRKP.....	2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Tata Kerja DPRKP	10
Gambar 3.1.	Konsep RENSTRA.....	45
Gambar 3.2.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.....	46
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD.....	54

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERUMAHAN RAKAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Soekarno-Hatta No. 09 Telp/Fax (0293) 3301866 Kota Mungkid

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya ,

Nama : KUNTA HENDRADATA, S.Sos.,MM.
NIP. : 196810101988031007
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/02/KEP/22/2020 tanggal 7 Januari 2020. Bertugas untuk dan Atas Nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Berkedudukan di Jalan Jl. Soekarno-Hatta No. 09, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang

KUNTA HENDRADATA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196810101988031007

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra DPRKP Kabupaten Magelang) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra DPRKP Kabupaten Magelang disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

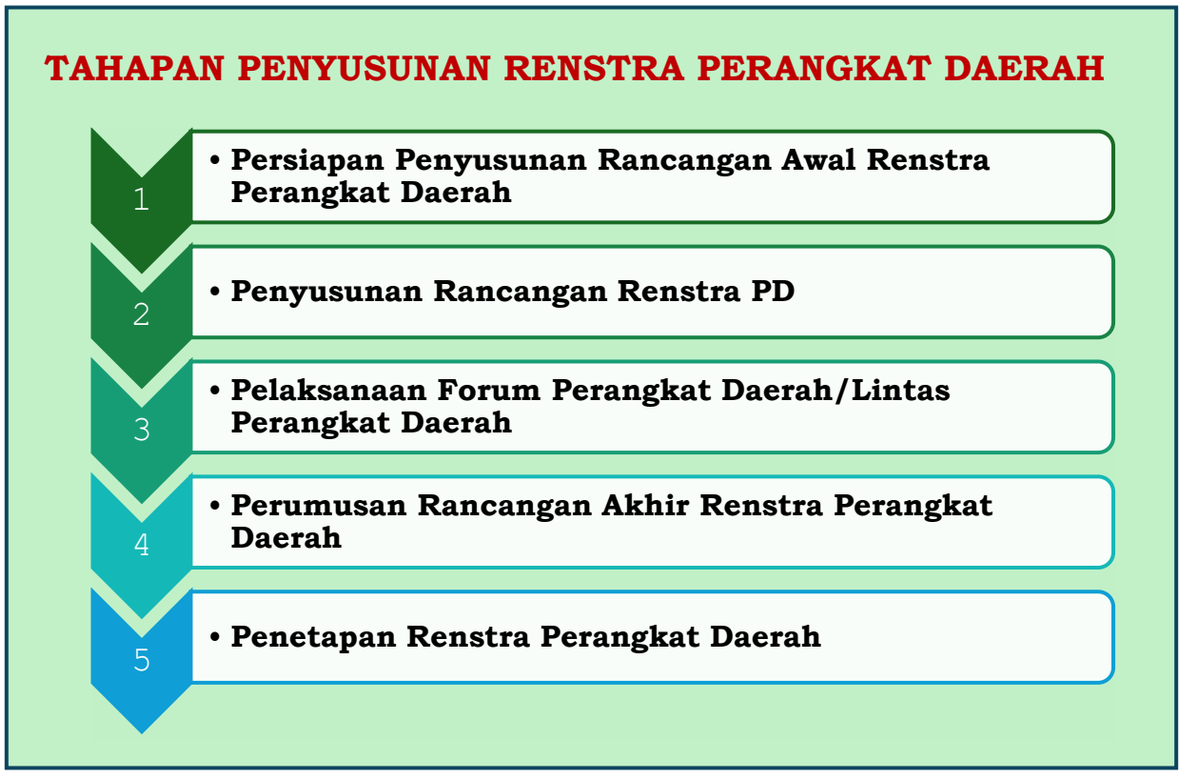
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra DPRKP Kabupaten Magelang) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Magelang, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang dengan memperhatikan *cascading* pada konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra DPRKP Kabupaten Magelang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra DPRKP Kabupaten Magelang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra DPRKP Kabupaten Magelang yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang

ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini :



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)), Renstra DPRKP Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dokumen ini diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, dan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya.

Tabel 1.1.
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2046

RPJPD Kab. Magelang Tahun 2025-2045	RPJMD Kab. Magelang Tahun 2025-2029
VISI : Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	**VISI** : Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
MISI : Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing	**MISI :** Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, berdaya saing, dan sehat dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk Misi 4. Mewujudkan mendukung perkembangan wilayah	**4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah**
Misi 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana
Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Renstra DPRKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diacu dan dipedomani dalam penyusunan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan provinsi. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Gambar berikut.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2031

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
VISI : Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas	**VISI :** Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress

MISI : Misi 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM.	**MISI :** Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	**Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah** Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana
Misi 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai penjabaran RPJM Nasional 2025-2029 diacu dan dipedomani dalam penyusunan dokumen Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Gambar berikut.

Tabel 1.3
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2031

RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
VISI : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	**VISI :** Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
MISI : Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	**MISI :** Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah**
Misi 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan Renstra DPRKP harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam Renstra DPRKP selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. RTRW Kabupaten Magelang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam Renstra DPRKP Kabupaten Magelang. Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra DPRKP ini juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang selama tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim). Penyusunan dokumen Renstra DPRKP Kabupaten Magelang juga perlu mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya

seperti Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang. Berdasarkan pasal 7 sampai dengan 10 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Renstra didasarkan pada orientasi proses dan orientasi substansi. Orientasi proses yang dimaksud merupakan cara penyusunan dokumen menggunakan beberapa pendekatan yang berdasar pada:

- Politik, sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih;
- Teknokratik, sebagai hasil pemikiran perencana daerah dalam penjabaran pemenuhan agenda pembangunan di rencana pembangunan jangka panjang dan antisipasi pada perkembangan keadaan;
- Partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- Top Down & Bottom Up , dengan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan orientasi substansi adalah isi dokumen sudah menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen rencana strategis DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kajian Rencana Strategis DPRKP Kab. Magelang 2025-2029, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Saran dan rekomendasi dari Bappeda dan Litbangda, Standar Pelayanan Minimal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah urusan perumahan dan permukiman, dan Tugas Pokok Fungsi DPRKP.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman di Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 15 Pebruari 2022 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda No 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai DPRKP Kabupaten Magelang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.1.2. Tujuan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Menjadi kerangka dasar bagi DPRKP Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-

2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPRKP Kabupaten Magelang secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRKP Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD dasar hokum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran tahun 2025 - 2029 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan dan merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan program kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan DPRKP Kabupaten Magelang

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tengah memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan kesekretariatan;

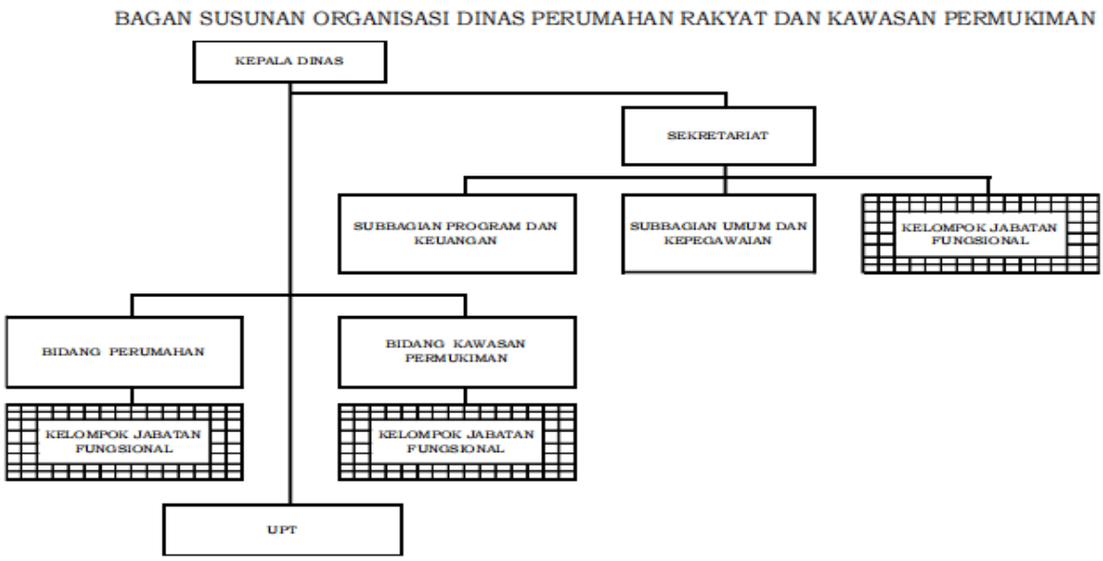
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
g. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman;
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
    1) Subbagian Program dan Keuangan;
    2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Perumahan
d. Bidang Kawasan Permukiman
e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
f. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang :

Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Magelang



Gambar 2.1

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang masing-masing jabatan/ bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan beberapa Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dijabarkan secara lengkap sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) Menyusun kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
5) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan perumahan;
6) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengembangan kawasan permukiman;
7) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengembangan permakaman;
8) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan permakaman;
9) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;

10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perumahan, kawasan permukiman dan permakaman;
11) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
14) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan permakaman;
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan perencanaan program, penatausahaan keuangan, umum, kepegawaian dan fasilitasi tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;

4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/ jasa atau barang milik daerah;
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan permakaman;

14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi atau dari pihak ketiga;
15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya DPRKP Kabupaten Magelang

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Jawa Tengah sejumlah 24 orang, terdiri dari 13 orang pegawai berjenis kelamin perempuan atau sekitar 54,83% dan 11 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 45,83%. Kondisi ini memperlihatkan sebagai dinas teknis memiliki sumber daya laki-laki jauh lebih besar dibandingkan sumber daya perempuan. Jumlah pegawai yang ada apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan					
	Dasar	Menengah		Tinggi		
	SD	SMP	SMA	D3	DIV /S1	S2
Jumlah Pegawai	0	1	5	3	8	7
	0	6		18		
TOTAL	24					

Sumber : Data DPRKP Kabupaten Magelang per 17 Juli 2025

Berdasarkan Gambar tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu sejumlah 18 orang atau sekitar 75 %, yang terdiri dari 3 orang merupakan lulusan D3, 8 orang lulusan DIV/S1, dan 7 orang yang merupakan lulusan S2. Banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat S2 menunjukkan kualitas SDM pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sudah baik.

Berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang terbagi dalam :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Golongan	**Jumlah Pegawai**				**Jumlah**
	a	**b**	**c**	**d**	
IV	5	1	1	0	7
III	3	4	1	0	8
II	0	0	3	3	6
I	0	0	0	0	0
Kelas 9					2
Kelas 7					1
TOTAL					**24**

Sumber: Data DPRKP Kabupaten Magelan per 17 Juli 2025

Untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang berdasarkan data Gambar 2.2 di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman golongan III yaitu sebanyak 8 pegawai atau sebesar 33,3% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 7 orang atau sebesar 29,17 % dan pegawai yang berada pada golongan II sejumlah 6 orang atau sebesar 25 %. Untuk PPPK Kelas 9 sebanyak 2 orang atau 8,33 % dan PPPK Kelas 7 sebanyak 1 orang atau 4,17 %.

Persentase Golongan III yang sebesar 33,3 % adalah PNS yang memiliki kemampuan/ SDM yang baik karena setara dengan tingkat pendidikan S1, semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi pula pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baik pula kualitas SDM yang ada. Oleh karena itu dengan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/ hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Rincian Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.

Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket.
1	Bangunan kantor	2	unit	Baik
2	Kendaraan bermotor roda 4	5	unit	Baik
3	Kendaraan roda 2	11	unit	Baik
4	Meja ½ biro	42	buah	Baik
5	Meja 1 biro	2	buah	Baik
6	Meja staf/ kerja	50	buah	Baik
7	Meja rapat	17	buah	Baik
8	Kursi Eselon II	1	buah	Baik
9	Kursi Eselon III	1	buah	Baik
10	Kursi Eselon IV	8	buah	Baik
11	Kursi Staf	11	buah	Baik
12	Kursi Lipat	14	buah	Baik
13	Kursi Rapat	80	buah	Baik
14	Meja kursi tamu	3	buah	Baik
15	Almari kayu	5	buah	Baik
16	Filing kabinet	5	buah	Baik
17	AC	4	unit	Baik
18	Komputer	3	unit	Baik
19	Laptop	9	unit	Baik
20	Printer	5	unit	Baik
21	Pesawat Telpon	1	unit	Baik
22	Pengadaan gedung kantor dan pagar	2	unit	Baik
23	Kamera	4	unit	Baik
24	Tripod camera	1	unit	Baik
25	Drone	1	unit	Baik
26	Proyektor	1	unit	Baik
27	PC Unit	2	unit	Baik

28	Note Book	1	unit	Baik
29	Monitor	2	unit	Baik
30	CPU	2	unit	Baik

Sumber: Data DPRKP Kabupaten Magelang per 17 Juli 2025

2.1.3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Berdasarkan dokumen utama KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, Kondisi pelayanan umum DPRKP Kabupaten Magelang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data backlog rumah di Kabupaten Magelang mencapai 55.735 unit. Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, baru ada satu perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 188.45/498/KEP/25/2014 (tanggal 8 Desember 2014) sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Kemudian melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha.

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.Untuk mengetahui kinerja DPRKP Kabupaten Magelang dapat dilihat dengan penilaian kinerja per tahun mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

TABEL 2.4
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPRKP KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	TARGET					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Cakupan Hunian Layak dan Berkualitas	%	NA	94,40	94,78	95,16	95,73	NA	94,46	94,82	95,09	95,43

TABEL 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020-2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN					REALISASI TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	NA	2.728.106.704	3.944.442.936	4.525.463.882	5.101.297.225	NA	2.728.106.704	3.578.875.559	4.325.785.314	4.831.433.624	NA	95,08	90,72	95,59	94,71
2	Program Pengembangan Perumahan	NA	44.193.000	112.761.310	406.391.434	340.301.745	NA	20.741.805	70.299.137	316.987.914	189.779.900	NA	46,93	62,32	78	55,77
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	NA	35.170.000	57.499.535	100.000.000	213.395.134	NA	12.144.070	50.316.536	63.254.382	89.886.195	NA	34,53	87,5	63,25	58,43
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	NA	-	-	13.600.000	22.075.000	NA	-	-	8.625.500	4.131.880	NA	-	-	63,42	18,72
5	Program Kawasan Permukiman	NA	1.317.239.007	128.284.000	506.567.500	27.000.000	NA	1.308.344.610	115.652.865	496.846.425	23.828.166	NA	99,32	90,1	98,08	86,33
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	NA	506.095.500	10.150.000.000	327.900.000	4.809.880.000	NA	426.646.550	9.348.796.545	319.425.063	4.311.665.302	NA	84,30	92,1	97,42	89,64

TABEL 2.6
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020-2024

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM					TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (PERSEN)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Misi : Meningkatkan daya sain daerahyan berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup																	
	Tujuan : 2.1.Meningkatnya daya saing daerah																	
	Sasaran : 2.1.2. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktu**r**																	
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	Persen	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Perentase layanan peningkatan PSU perumahan	Persen	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase layanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persen	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM					TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (PERSEN)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	Program Kawasan Permukiman	Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas	Persen	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	NA	48,16	52,71	57,27	61,83	NA	55,64	58,59	60,70	61,83	NA	115,53	107,63	99,06	102,64

Dalam rangka pencapaian target yang ada dalam Gambar diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tercapainya realisasi sesuai dengan target-target yang ada sangat didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran dan konsistensi kebijakan;
b. Secara umum target dan realisasi sudah sesuai dengan harapan, hanya perlu konsistensi untuk mempertahankannya.

Indikator rumah tangga terhadap akses hunian layak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hunian yang dinilai layak, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan hunian, serta tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mengingat adanya variasi dalam penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota), pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan menggunakan proksi yang memenuhi lima kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durable housing), yang mencakup kelayakan material atap, dinding dan lantai;
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) dengan luas lantai per kapita minimal 7,2 m2;
3. Akses terhadap sumber air minum yang layak;
4. Akses terhadap sanitasi yang layak;
5. Pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023 masih dalam proses penghitungan. Melalui indikator proxy (persentase jumlah rumah layak huni terhadap seluruh jumlah rumah) yang diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, akses

hunian layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 67,73 persen dan meningkat menjadi 95,07 persen pada tahun 2023. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh hunian di Kabupaten Magelang telah memenuhi standar layak dan berkualitas. Sedangkan berdasarkan data dari BPS Provinsi Jateng, dari rentang tahun 2020 hingga 2023, capaian rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,10 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 67,27 persen dan meningkat menjadi 74,38 persen pada tahun 2023. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kualitas hunian di Kabupaten Magelang, yang mencerminkan keberhasilan intervensi program penyediaan perumahan dan peningkatan infrastruktur permukiman. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh rumah tangga memperoleh akses terhadap hunian yang aman, sehat, terjangkau, dan sesuai standar teknis bangunan.

i. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah seluruh stakeholders baik pada Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman. Stakeholders DPRKP Kabupaten Magelang merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholders tersebut berasal dari berbagai lini, yaitu Masyarakat, Swasta, Organisasi Non-Pemerintah, Akademisi, dan Pemerintah (baik Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa).

2.1.5. Kerjasama DPRKP Kabupaten Magelang dalam pemberian pelayanan

DPRKP Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Lembaga-lembaga di bawah ini dalam bentuk CSR untuk bantuan sosial perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Magelang. CSR adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan

masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Adapun Lembaga-lembaga tersebut meliputi :

a. PT BPR Bank Pasar 69 (PERSERODA)
b. Bank Jateng
c. BAZIS Kabupaten Magelang
d. PT Taman Wisata Candi Borobudur

Adapun CSR yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar berikut :

TABEL 2.7.
REKAP BANTUAN SOSIAL RTLH CSR
TAHUN 2020-2025

TAHUN	BANK JATENG CAB. MUNGKID	BAPAS 69	PT TWC BOROBUDUR	PT MEKAR ARMADA JAYA	BAZNAS KAB	BAZNAS PROVINSI	BAZNAS RI
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	1	1	25	-	-
2024	25	5		-	26	47	5
2025 (Sept)	28	10	2	-	25	5	-

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPRKP Kabupaten Magelang

2.2.1. Permasalahan

Tantangan dan peluang pembangunan perangkat daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan

pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Uraian permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia (SDM) PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
b. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana kegiatan dinas untuk menunjang produktivitas kerja yang semakin tinggi dalam pelaksanaan tupoksi secara menyeluruh;
a. Masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni.
b. Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah kelurga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah;
c. Penanganan pasca bencana alam dalam penyediaan rumah dan PSU-nya belum terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masih banyak yang belum tertangani;
d. Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan utilitas lingkungan (PSU) permukiman;
e. Masih banyaknya lingkungan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh);
f. Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang belum terfasilitasi;
i. Pelayanan pengadaan tanah dalam hal penetapan lokasi, masih membutuhkan banyak perhatian terkait dengan seringnya perubahan atau penambahan bidang tanah yang harus ditetapkan;
j. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang masih kurang, terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;

k. Pelayanan informasi dan basis data yang masih terbatas dan membutuhkan keterpaduan program penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
l. Belum tersedianya kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten yang lebih rinci
m. Belum tersedianya mekanisme kemitraan, pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi, penyediaan Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (lisiba), serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
n. Belum adanya mekanisme penyediaan data, monitoring, pemantauan dan evaluasi kinerja perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh.
o. Keterbatasan kewenangan bidang Perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha, Penyelenggaraan PSU permukiman, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Disamping kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan lain yang relevan.

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
DPRKP Kabupaten Magelang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman layak	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	Belum tersedianya datapenyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atas relokasi program kabupaten /kota
			Belum optimalnya persediaan rumah layak huni bagi korban bencana
			Belum optimalnya pembinaan tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota
			Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana / yang terdampak program kabupaten/kota
			Belum optimalnya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten
			Belum optimalnya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus

		Belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan Permukiman	Belum optimalnya layanan peningkatan PSU
		Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh	Belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Belum optimalnnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Belum optimalnnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

b. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan

dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku. Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebiijakan berikut program-program pembangunannya.

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario (indikator dengan upaya tambahan) dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Adapun Isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Pilar Sosial :
   (1) Penanggulangan kemiskinan;
   (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   (3) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
   (4) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Pilar Ekonomi :
   (5) Daya saing dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Pilar Lingkungan :
   (6) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola :
   (9) Tata kelola pemerintah yang baik dan kondusivitas wilayah.

Sehingga isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah **Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak**, yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

(1) Masih tingginya rumah yang tidak layak huni karena keterbatasan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni, belum optimalnya penyediaan rumah layak huni oleh pemerintah;

(2) Masih adanya kawasan permukiman kumuh karena kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata; serta

(3) Belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap karena sebagian besar PSU perumahan belum menjadi aset pemerintah daerah, masih dalam proses serah terima dari pengembang ke pemerintah daerah, juga disebabkan oleh tempat pemakaman umum milik pemerintah daerah luasnya masih terbatas dan jangkauan masih terbatas di wilayah beberapa kecamatan.

Adapun teknik menyimpulkan isu srtategis DPRKP Kabupaten Magelang, dapat dilihat pada table 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
DPRKP Kabupaten Magelang sudah mempunyai SK Bupati tentang Kawasan Kumuh dan Dokumen RP2KPKP sebagai dasar pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang disebabkan oleh : 1. Masih tingginya rumah yang tidak layak huni karena keterbatasan akses terhadap pemenuhan rumah layak B11 belum optimalnya penyediaan rumah layak huni oleh pemerintah	1. Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 2. Belum optimalnya kualitas air, akses sanitasi dan persampahan	**Tujuan global pembangunan berkelanjutan :** **Tujuan 6** : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	Program pembangunan nasional " 3 juta rumah"	Percepatan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak

	2. Masih adanya kawasan permukiman kumuh karena kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata, 3. Belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap.		**Tujuan 11** : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode 2025–2029 adalah : "Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress" dapat terwujud secara efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan

oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Pencapaian Magelang Nyaman dalam lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya. Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang sehat. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif. Dalam lima tahun ke depan untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi. Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM. Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip keadilan dan pemerataan harus diberlakukan untuk semua bidang pembangunan dan seluruh wilayah di Kabupaten Magelang. Dalam hal ini DPRKP melaksanakan visi “ Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi maka disusunlah misi. Misi secara umum merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kata kunci yang termaktub dalam visi dijabarkan dalam lima misi utama (Panca Dharma) sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.**
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait dengan **misi ke 4** yaitu **mewujudkan pemerataaan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.** Misi keempat ini akan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kualitas dan kuantitas perumahan juga menjadi perhatian, dengan 378.533 unit rumah yang tersedia saat ini, namun masih ada kesenjangan yang signifikan untuk mencapai target 466.266 unit pada tahun 2029, yang menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan akses ke hunian layak. Selain itu, akses sanitasi aman di Kabupaten Magelang masih sangat rendah, hanya 1,51 persen, dengan target peningkatan menjadi 19,52 persen pada tahun 2029. Sanitasi yang aman sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan infrastruktur, penyediaan perumahan layak, dan akses sanitasi aman adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang. Selain itu, percepatan pembangunan perumahan berkualitas melalui inovasi desain dan material ramah lingkungan akan mengatasi kesenjangan hunian, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Akses sanitasi yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan akan meningkatkan kesehatan

dan kualitas hidup, membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih sejahtera.

TABEL 3.1.
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

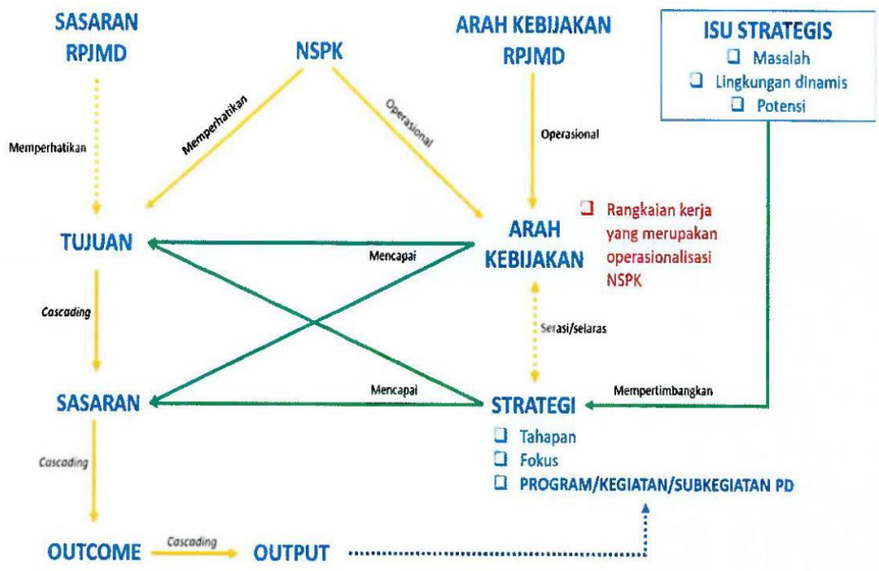
Visi : "Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress"					
No	**Misi dan Program Bupati dan Wakil BUpati**	**Tupoksi PD**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
				Pendorong	**Penghambat**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Misi : 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah. a. Program penanggulangan kemiskinan a.RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin Program Lingkungan Hidup Pengembangnan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh	**Tugas :** Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi: Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawsan permukiman dan kesekretariatan; Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan administrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;	1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan berkualitas bagi seluruh masyarakat; 2. Belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan permukiman; 3. Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh	• Adanya program pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk kegiatan RTLH; • Adanya kegiatan yang menangani masalah PSU; • Adanya kegiatan yang menangani kawasan permukiman kumuh; • Adanya kegiatan untuk pembelian lahan TPU di Kabupaten Magelang	• Masih banyaknya masyarakat yang masuk daftar BDT • Masih banyaknya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah; • Masih banyaknya luas kawasan permukimn kumuh; • Belum adanya lahan TPU di Kabupaten Magelang.

		Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidag perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.			

3.1. Tujuan dan Sasaran

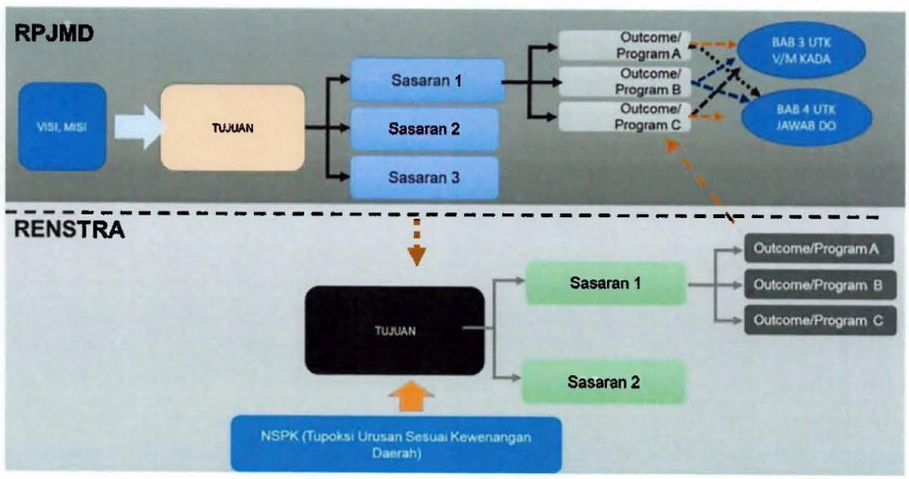
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama dua tahun. Tujuan merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian

kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang. Strategi Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, konsep Renstra DPRKP Kabupaten Magelang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Konsep Renstra DPRKP Kabupaten Magelang

Tujuan perangkat daerah tidak lepas dari sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD dalam Renstra DPRKP 2025-2029 merupakan tujuan perangkat daerah. Berikut merupakan gambaran kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang

3.1.1. Tujuan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. **Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat** adalah tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

3.1.2. Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang adalah:

1). Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.

2). Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang beserta dengan indikator kinerjanya. Rumusan tujuan dan sasaran SKPD beserta indikatornya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	**T1 Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat**		**T1 Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman**	**50,22**	**50,65**	**51,26**	**51,96**	**52,67**	**53,17**	**53,57**	
		S1.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	S1.1 Rumah Tangga dengan akses hunian layak.	96,3	96,47	96,69	96,91	97,13	97,35	97,53	
		S1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	S1.2 Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	4,13	4,83	5,82	7,01	8,20	9,00	9,62	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DPRKP Kabupaten Magelang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Strategi Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program,kegiatan.subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.

Renstra DPRKP Kabupaten Magelang dijabarkan dalam tahapan yang sesuai dengan tahapan RPJMD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang disajikan seperti pada Tabel di 3.3 bawah ini.

Tabel 3.3

Penahapan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan Pondasi (Memperkuat kualitas kinerja infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah)	**Konsolidasi Pondasi** (Meningkatkan kinerja infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di sluruh wilayah).	**Akselerasi** (Mempercepat akselerasi peningkatan kinerja infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di sluruh wilayah).	**Pemantapan** (Memantapkan peningatan kinerja infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di sluruh wilayah).	**Mewujudkan** (mewujudkan kinerja infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah).

3.3. Arah Kebijakan DPRKP Kabupaten Magelang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKP Kabupaten Magelang dan arah kebijakan RPJMD serta

selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang.

Arah Kebijakan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPRKP Kab. Magelang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPRKP KABUPATEN MAGELANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh UU No 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan Kawasan permukiman di Indonesia UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana PP Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun Perda Kabupaten Magelang Nomor 4	Meningkatkan akses dan penyediaan rumah layak huni.	1. Melakukan identifikasi dan menyusun pendataan tentang penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 2. Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi terkait persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam kabupaten 3. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana/yang terdampak program kabupaten. 4. Meningkatkan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten.	

	Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda No 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:13 Tahun 2023 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.		5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. 6. Meningkatkan layanan perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan	
		Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum	1. Meningkatkan layanan PSU 2. Meningkatkan layanan sertifikasi bidang perumahan	
		Meningkatkan Keteraturan Bangunan dan Kualitas Permukiman	1. meningkatkan kualitas penataan dan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui tahapan identifikasi, perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait. 2. meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	

			di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3. Meningkatkan pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas.

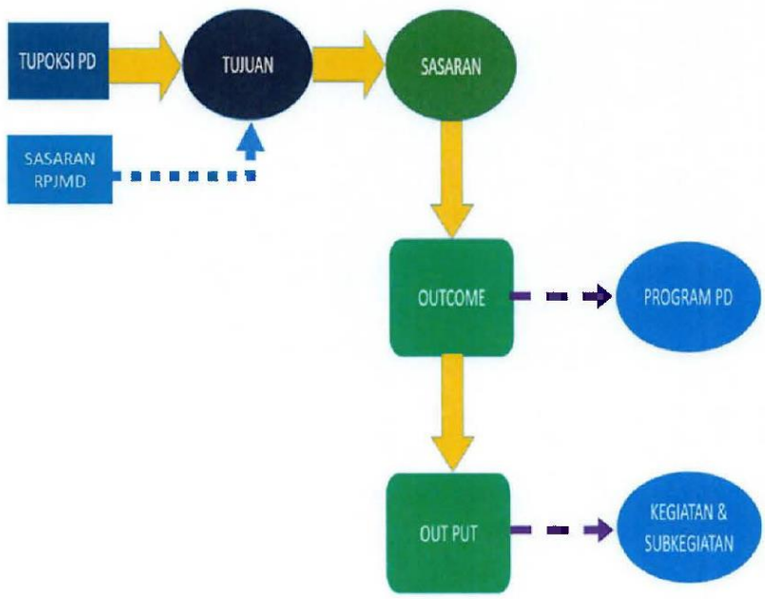
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Presiden menginstruksikan agar capaian tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen dapat dicapai pada tahun 2024 atau enam tahun lebih cepat dari SDGs, oleh karena itu penghapusan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mendasarkan langkahnya pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Magelang akan melaksanakan serangkaian intervensi terarah dan nyata yang mencakup aspek kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penguatan akses layanan, dan pendekatan berbasis wilayah.

Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.Tujuan mulia dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir. Implementasi program 3 juta rumah di DPRKP Kabupaten Magelang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- Penyediaan Rumah Layak Huni
- Pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
- Pembebasan biaya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasional yang ditempuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dituangkan dalam program dan kegiatan serta subkegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan di Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, perlu didukung dengan program Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, di mana program Perangkat Daerah tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan DPRKP Kabupaten Magelang tahun 2026-2030 termasuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. Program Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan perumahan.
b. Program Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh perkotaan.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektare.
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) diarahkan untuk meningkatkan PSU perumahan.
e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni.

Selain itu, Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program perangkat daerah tersebut dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif dan analisis mendalam terhadap kondisi aktual Kabupaten Magelang. Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu merespons tantangan pembangunan, memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mengatasi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, program-program tersebut diturunkan menjadi kegiatan dan subkegiatan yang disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029.

Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan DPRKP Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 4.1.
Rumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.	Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat				Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		
		1.Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni			1.Rumah Tangga dengan akses hunian layak 2. Persentase luasan Kawasan kumuh perkotaan yang ditangani		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan yang terkena Relokasi akibat program pemerintah)		Presentase Layanan Pengembangan Perumahan	**1.Program Pengembangan Perumahan**	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten	jumlah dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	
						1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
						2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
						3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
						4. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
						5. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / kkota	
						6. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	
						7. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten / kota	
						8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota.	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	
						1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	
				Rumah Korban Bencana / Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhab	Jumlah Rumah Korban Bencana / Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhab	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	
						1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						3. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	
						4. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5. Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	
						6. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / kota	
						7. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten / kota	
				Rumah bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang terdistribusi dan telah diserahterimakan	jumlah Rumah bagi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Kabupaten yang terdistribusi dan telah diserahterimakan	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	
						1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
						2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						3. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
						4. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus.	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	
						1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
						2. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	
				Ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	**Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	
						1. Fasiitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	
						2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Meningkatkan penyediaan PSU perumahan dan permukiman		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	**2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum**	
				Laporan Peningkatan Layanan PSU Perumahan	**umlah Perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	
						1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
						2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						4. Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						5. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
			1. Meningkatnya sertifikasi		**Persentase layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi**	**3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan**	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan		Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
				Laporan layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
		2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	**4. Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh < 10 ha**		**Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan dibawah 10 ha yang ditangani**	**4.Program Kawasan Permukiman**	
				Laporan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	**jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata dan dibina**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
						1. Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
						2. Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
						3.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	**Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
						1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni)	
						2. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan PermukimanKumuh	
						3. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
						5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	**Jumah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan permukiman kumuh**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**	
						1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9.436.435.865,00		25.809.983.249,00		25.796.661.842,00		27.907.309.606,00		30.694.615.500,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.848.439.000,00		4.976.439.000,00		4.976.439.000,00		4.976.439.000,00		4.976.439.000,00		
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	4.848.439.000,00	100	4.976.439.000,00	100	4.976.439.000,00	100	4.976.439.000,00	100	4.976.439.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	3	11.000.000,00	2	11.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	3	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	8	3.000.000,00	8	3.000.000,00	8	3.000.000,00	8	3.000.000,00	8	3.000.000,00		
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		
Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.835.122.000,00		3.835.122.000,00		3.835.122.000,00		3.835.122.000,00		3.835.122.000,00		
Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00	18	4.000.000,00		
Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.780.122.000,00		3.780.122.000,00		3.780.122.000,00		3.780.122.000,00		3.780.122.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00	25	3.780.122.000,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00	16	4.000.000,00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
1.04.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00		
1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00	30	2.000.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		
Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00	20	4.000.000,00		
Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00	15	60.000.000,00		
Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.317.000,00		58.317.000,00		58.317.000,00		58.317.000,00		58.317.000,00		
Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00	48	47.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.317.000,00		9.317.000,00		9.317.000,00		9.317.000,00		9.317.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00	48	9.317.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				823.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	572.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				572.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	572.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00	5	700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00	16	235.000.000,00		
Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00	23	7.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tau bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara Direhabilitasi				0		0		0		0		0		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				685.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		1.045.000.000,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, masyarakat miskin, Korban Bencana, dan yang terkena bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah)	Persentase layanan pengembangan perumahan (%)	100	100	685.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.045.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Dokumen data bakal Calon Penerima Rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota yang Terverifikasi.	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota yang Terverifikasi.	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Dokumen Data Calon Penerima bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi.	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
Dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00		
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	40	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00	40	5.000.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				445.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		
Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00		155.000.000,00		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	5	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00	5	155.000.000,00		155.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	5	150.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				150.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	5	150.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00	5	270.000.000,00		
Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	3	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
Rumah Korban Bencana / Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhab	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah.	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.04.0004 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Rumah tangga yang terdampak bencana kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi bantuan penyediaan rumah	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		5.000.000,00		
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		5.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				155.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		
Dokumen Laporan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	153.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				153.000.000,00		383.000.000,00		383.000.000,00		383.000.000,00		383.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	153.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00	1	383.000.000,00		
Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
Sistem layanan informasi dan komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun / Terpeliharan	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.04.02.2.06.0005 - Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				305.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		405.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas (%)	100	100	305.000.000,00	100	405.000.000,00	100	405.000.000,00	100	405.000.000,00	100	405.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun / tereview / Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang di bentuk / di bina	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Rumah Tangga yang terfasilitasi Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	200	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00		
1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	200	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				215.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		
Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		5.000.000,00		
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		5.000.000,00		
Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	0,5	0,5	25.000.000,00	0,5	25.000.000,00		25.000.000,00	0,5	25.000.000,00	0,5	25.000.000,00		
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	0,5	0,5	25.000.000,00	0,5	25.000.000,00		25.000.000,00	0,5	25.000.000,00	0,5	25.000.000,00		
Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	5	185.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				185.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	5	185.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00	10	285.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				3.357.996.865,00		19.081.544.249,00		19.068.222.842,00		21.178.870.606,00		23.966.176.500,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh (%)	61,83	71,01	3.357.996.865,00	72,21	19.081.544.249,00	74,05	19.068.222.842,00	76,19	21.178.870.606,00	78,32	23.966.176.500,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				3.357.996.865,00		19.081.544.249,00		19.068.222.842,00		21.178.870.606,00		23.966.176.500,00		
Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00	5	260.000.000,00		
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	266	120	3.097.996.865,00	921	18.821.544.249,00	920	18.808.222.842,00	1.020	20.918.870.606,00	1.165	23.706.176.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.097.996.865,00		18.821.544.249,00		18.808.222.842,00		20.918.870.606,00		23.706.176.500,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	266	120	3.097.996.865,00	921	18.821.544.249,00	920	18.808.222.842,00	1.020	20.918.870.606,00	1.165	23.706.176.500,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				235.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase layanan peningkatan PSU perumahan (%)	100	100	235.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	100	297.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				235.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		297.000.000,00		
Dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	12.000.000,00		12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	12.000.000,00		12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		25.000.000,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	2	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		25.000.000,00		
Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				150.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		20.000.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		20.000.000,00		
Lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan perbaikan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Persentase penanganan PSU Perumahan layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasikiasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata dengan perangkat daerah penanggungjawab yang melekat pada program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

1. Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe (misi 1)
2. Sehat Wargane (misi 1)
3. **Makmur Rakyate (misi 3 dan misi 4)**
   a. Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi).
   b. Rekonstruksi jalan tambang.
   c. Program rumah layak.
   d. Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM).
   e. Pengentasan kemiskinan secara terpadu.
   f. Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem.
4. Gemilang Potensine (misi 3)
6. Gumregrah Wargane (misi 3)
7. Lestari Alame (misi 5).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan dan mendukung Sapta Cipta yang ke 3 yaitu **“ Makmur Rakyate”**. Adapun daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada table 4.4. sebagai berikut.

Tabel 4.3
Program Prioritas Pendukung Sapta Cipta

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	Sapta Cipta ke 3 : Makmur Rakyate			
1	**Program rumah layak**			
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh < 10 ha	1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan dokumen sektoral PKP
			2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial penanganan RTLH
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial penanganan RTLH

	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan yang terkena Relokasi akibat program pemerintah)	1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
			Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan/Rehabilitasi rumah untuk korban bencana
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1).Sub kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemeliharaan PSU
			2).Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan/peningkatan PSU
2	**Pengentasan kemiskinan secara terpadu**			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis desa
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
3	**Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem**			

	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	
		Jumlah Rumah Tidak Huni yang dibangun dalam rangka pencegahan kumuh	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pembangunan rumah untuk kemiskinan ekstrim (Tuku omah sak lemahe)
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan yang terkena Relokasi akibat program pemerintah)	2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota (Tahun 2026-2029)
			Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota (Tahun 2025)

DPRKP Kabupaten Magelang juga mendukung terlaksananya Program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) untuk memperkuat data kemiskinan di Kabupaten Magelang. KK yang diverifikasi berjumlah 279 KK yang tersebar di 11 dusun. Dusun-dusun tersebut meliputi Dusun Powan, Wulung, Batur, Seguweng, Sremben, Glondong Tengah, Gondong Blumbang, Blumbang, Glondong Duwur, Powan dan Gerdu Kidul. Petugas yang melaksanakan VDK Tahun 2025 terdiri dari 23 orang.

Indikator kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini.

Tabel 4. 4.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATU-AN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman	%	50,65	51,26	51,96	52,67	53,17	53,57	Tujuan PD
2	Rumah Tangga dengan akses hunian layak	%	96,47	96,69	96,91	97,13	97,35	97,53	Sasaran PD
3	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	%	4,83	5,82	7,01	8,20	9,00	9,62	Sasaran PD

Selain IKU perangkat daerah, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPRKP Kabupaten Magelang juga diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang IKK, tidak terdapat indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	100	(Persentase ketersediaan dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten + Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota + Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau Relokasi program kabupaten + Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang terdistribusi dan telah diserahterimakan + Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus + Persentase ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitka)/6
2	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	NA	100	100	100	100	100	100	(Jumlah Perumahan yang sudah di lengkapi PSU/Jumlah Perumahan) * 100%

NO	INDIKATOR	SATUAN	2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	100	100	100	100	100	100	100	((Realisasi jumlah koordinasi yang dilaksanakan tahun n/rencanajumlah koordinasi yang dilaksanakan tahun n*100)+(Realisasi jumlah laporan yang disusun tahun n /rencana jumlah laporan yang disusun tahun n*100%))/2
4	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan di bawah 1o Ha yang ditangani	%	NA	100	100	100	100	100	100	(Realiasasi luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani tahun n/rencana luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani tahun n)*100%
5	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	%	NA	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100	(Realisasi Jumlah penanganan RTLH s.d tahun n/ Rencana Jumlah RTLH yang akan ditangani sampai akhir tahun RPJMD)* 100%
6	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	4,18	4,16	4,14	4,12	4,10	4,08	4,06	
7	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra DPRKP Tahun 2025-2029 merupakan hasil perbaikan dari Rancangan Awal DPRKP 2025-2029. Setelah melalui tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra DPRKP Kabupaten Magelang disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029 serta masukan para pemangku kepentingan.

Renstra DPRKP Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKP Kabupaten Magelang untuk lima tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh jajaran pada DPRKP Kabupaten Magelang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPRKP Kabupaten Magelang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPRKP Kabupaten Magelang.

Renstra DPRKP Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPRKP Kabupaten Magelang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akunGambar serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPRKP Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPRKP beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPRKP secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi DPRKP Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang



KUNTA HENDRADATA, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196810101988031007

Cascade DPRKP 2025-2029

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belum optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(70% Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur dasar + 30% Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman)	Indeks Kinerja pembangunan Infrastruktur wilayah merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kinerja layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perumahan dan permukiman	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur perumahan dan permukiman	(50%rumah tangga dengan akses hunian layak +50%Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani)	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur perumahan dan permukiman merupakan peningkatan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang meliputi peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	1. Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	1. Meningkatkan akses dan penyediaan rumah layak huni	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur perumahan dan permukiman

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										2. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman	2. Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum			

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Meningkatkan penanganan kawasan permukiman			3. Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh	3. Meningkatkan Keteraturan Bangunan dan Kualitas Permukiman			

Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	DO Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	DO Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah (Strategi RPJMD)	Arah Kebijakan Daerah (Arah Kebijakan RPJMD)	Isu Strategis PD	Tujuan PD (Tujuan Restra PD)	Indikator Tujuan PD
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(50%rumah tangga dengan akses hunian layak +50%Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani)	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur perumahan dan permukiman merupakan peningkatan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang meliputi peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	1.-Rumah Tangga dengan akses hunian layak	1. Sesuai Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 000.7/0002940 tahun 2024 : menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). PHLTB (proksi) = JRTHLTB (proksi) / (JRT x 100) - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak,	Rumah Tangga dengan akses hunian layak merupakan peningkatan persentase layanan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau dan berkelanjutan	1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	1. Meningkatkan pengembangan perumahan	**1.Program Pengembangan Perumahan**	Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, Masyarakat Miskin, Korban Bencana dan yang terkena Relokasi akibat program pemerintah)	**Persentase Layanan Pengembangan Perumahan**

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
							2. Belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan Permukiman	2. Meningkatkan Pengelolaan penanganan PSU Perumahan dan Permukiman	**2.Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum**	Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	**Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**
									3.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	**Persentase layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU**

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	2. Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	(Luasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani sampai dengan tahun n/luasan permukiman kumuh perkotaan)*100%	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani merupakan Persentase Peningkatan penanganan kawasan kumuh perkotaan	3. Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh	3. Meningkatkan Kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan mencegah kawasan permukiman kumuh	**4.Program Kawasan Permukiman**	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh < 10 ha	**Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan dibawah 10 ha yang ditangani**

Formula Tujuan PD	DO Indikator Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran PD	Formula Sasaran PD	DO Indikator Sasaran PD	Masalah PD	Strategi PD (Strategi Renstra PD)	Program	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Program
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
									5.Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	**persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
(Persentase ketersediaan dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten + Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota + Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau Relokasi program kabupaten + Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang terdistribusi dan telah diserahterimakan + Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus + Persentase ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan)/6	1. Belum tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Melakukan identifikasi dan menyusun pendataan tentang penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten**	**jumlah dokumen rehabilitasi korban bencana dan relokasi program kabupaten**	**Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan + Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten+ Jumlah Dokumen hasil penilaian kerusakan rumah akibat bencana Kabupaten + Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus + Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota + Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi + Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota + Jumlah dokumen data bakal Calon Penerima Rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota yang Terverifikasi**	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2. Belum optimalnya persediaan rumah layak huni bagi korban bencana		1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	TersusunnyaDokumenDataRumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	TersusunnyaDokumenDataRumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen hasil penilaian kerusakan rumah akibat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil penilaian kerusakan rumah akibat bencana Kabupaten/Kota	
			4. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	TersusunnyaDokumenDataRumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	
			5. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten / kkota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dibagi rencana pendataan rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dibagi rencana pendataan rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
			6. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	
			7. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten / kota	TersusunnyaDokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			8. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota.	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data bakal Calon Penerima Rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota yang Terverifikasi	Jumlah dokumen data bakal Calon Penerima Rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota yang Terverifikasi	
	3. Belum optimalnya pembinaan tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	**Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi terkait persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi progam kabupaten**	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota**	
			1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	4. Belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana /yang terdampak program Kabupaten	**Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana/yang terdampak program kabupaten**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Rumah Korban Bencana / Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhab**	**Jumlah Rumah untuk Korban Bencana dan atau untuk Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhabilitasi**	**Jumlah Rumah untuk Korban Bencana dan atau untuk Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang dibangun dan direhabilitasi**	
			1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
			2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			3. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan	Rumah Tangga bagi korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah.	
			4. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah.	Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah.	
			5. Pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program Kabupaten / Kota	

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
			6. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten / kota	
			7. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten / kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana kabupaten / kota	
	5. Belum optimalnya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	**Meningkatkan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten**	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Rumah bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota yang terdistribusi dan telah diserahterimakan**	**jumlah Rumah bagi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Kabupaten yang terdistribusi dan telah diserahterimakan**	**jumlah Rumah bagi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Kabupaten yang terdistribusi dan telah diserahterimakan**	
			1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan penyediaan	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan penyediaan rumah	
			2. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPenatausahaanSerah TerimaRumahbagiMasyarakatyang Terkena Relokasi Program	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	
			3. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPenatausahaanSerah TerimaRumahbagiKorbanBencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	
			4. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah tangga yang terdapak bencana kabupaten/kota yang	Jumlah rumah tangga yang terdapak bencana kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi	
	6. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	**Meningkatkan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	**Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	**Jumlah Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun + Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	
			1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
			2. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	7. Belum optimalnya layanan perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan	**Meningkatkan layanan perijinan pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	**Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	**Jumlah ijin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	
			1. Fasiitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	TersusunnyaKesepakatanKomitmen dengan Pengembang/Pelaku PembangunanuntukPenerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Rencana Tapak yang diterbitkan	Jumlah Persetujuan Rencana Tapak yang diterbitkan	

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
(Jumlah Perumahan yang sudah di lengkapi PSU / Jumlah Perumahan) * 100%	**Belum optimalnya layanan peningkatan PSU**	**1. Meningkatkan layanan PSU**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Laporan Peningkatan Layanan PSU Perumahan**	**Jumlah Perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik**	**Jumlah Perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik**	
			1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	TersusunnyaDokumen Perencanaan Penye	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	
			2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmumdi Perumahanuntuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	
			3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan	
			4. Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang diperbaiki	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang diperbaiki	
			5. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan dari Pengembang	
(Realisasi layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang dilaksanakan pada tahun n/rencana jumlah layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU pada tahun n*100%)	**belum optimalnya layanan sertifikasi perumahan**	**Meningkatkan layanan sertifikasi bidang perumahan**	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Laporan layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Jumlah layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Jumlah layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana danUtilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
			1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
(Luasan permukiman kumuh perkotaan dibawah 10 ha yang ditangani sampai dengan tahun n/luasan permukiman kumuh perkotaan dibawah 10 ha)*100%	**1. belum optimalnya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**meningkatkan kualitas penataan dan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui tahapan identifikasi, perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Laporan penataan dan peningkataan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditata dan dibina**	**jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang dibentuk dan dibina kelompok swadaya masyarakatnya + jumlah kawasan permukiman kumuh yang telah disusun dokumen perencananaan dan penanganannya + jumlah kawasan kumuh yang ditingkatkan kesadaran rumah tangganya untuk mewujudukan rumah sehat dan layak huni**	
			1. Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk dan dibina	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk dan dibina	
			2. Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/tereview	Jumlah dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/tereview	
			3.Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
	2. Belum optimalnnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**meningkatkan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Laporan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Jumlah laporan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	**Jumlah laporan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh**	
			1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Mendukung Misi ke 4 Sapta Cipta ke 3 point c Program rumah layak huni dan point e Sapu Jagad Kemiskinan)	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang ditangani	Jumlah RTLH yang ditangani	
			2. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan KawasanPermukimanKumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
			3. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	

Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Arah Kebijakan PD	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Keluaran/ Output	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
31	32	33	34	35	36	37	38
(Realisasi Jumlah penanganan RTLH s.d tahun n/ Rencana Jumlah RTLH yang akan ditangani sampai akhir tahun RPJMD)* 100%	Belum optimalnnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	meningkatkan pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditangani**	**Jumah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan permukiman kumuh**	**Jumah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan permukiman kumuh**	

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/330/KEP/07/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi;
b. menyusun dokumen rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/330/KEP/07/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	KUNTA HENDRADATA, S.Sos., M.M.	Kepala DPRKP	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	TRI RAHAYU HANDAYANI, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada DPRKP	Wakil Ketua	
3.	URIP SETYOWATI, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada DPRKP	Sekretaris	
4.	RETNO AYU KUSUMOWATI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perumahan pada DPRKP	Anggota	
5.	TITIK HANDAYANI, S.Sn., M.M.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada DPRKP	Anggota	
6.	FAKHRUDIN MARTANTO, S.T., M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada DPRKP	Anggota	
7.	RAHAYU HADI MUSLIH, S.T., M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada DPRKP	Anggota	
8.	TITIN IRYANI, S.E.	Penelaah Kebijakan Teknis pada DPRKP	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner